

## Bab I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kerjasama sains dan teknologi (S&T) yang telah dibina oleh Jerman dan Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun merupakan sejarah panjang yang dalam perjalanannya mengalami fase naik dan turun. Kerjasama tersebut berawal ketika pada Oktober 1955 pemerintah Jerman mendirikan Kementerian Federal bidang Nuklir atas inisiasi dari Konrad Adenauer<sup>1</sup> yang pada 1969 berubah nama menjadi Kementerian Federal bidang Pendidikan dan Sains (BMBW<sup>2</sup>). Namun pada 1972 pemerintah Jerman membentuk Kementerian Federal bidang Riset dan Teknologi (BMFT<sup>3</sup>) yang mengurus riset dasar, riset terapan dan pengembangan teknologi. BMFT kemudian mendapat tugas untuk meneruskan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan nuklir sedangkan BMBW menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Energi nuklir pada saat itu dianggap penting sebagai sumber energi masa depan sehingga pada tahun 60an Jerman mengembangkan reaktor nuklir. Reaktor nuklir merupakan suatu alat untuk mengendalikan reaksi fisi<sup>4</sup> berantai dan sekaligus menjaga kesinambungan reaksi itu dengan menggunakan materi nuklir sebagai bahan bakarnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa reaktor nuklir merupakan tempat berlangsungnya reaksi nuklir yang terkendali<sup>5</sup>. Materi yang digunakan sebagai bahan bakar antara lain uranium dan plutonium. Karena sumber uranium yang dimiliki Jerman terbatas, maka pada tahun 70an hingga 80an, Jerman melalui BMFT membuka kerjasama dengan beberapa negara di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Selatan untuk mengembangkan energi nuklir yang sekaligus bertujuan untuk mencari sumber uranium. Indonesia merupakan

---

<sup>1</sup> Konrad Hermann Josef Adenauer merupakan negarawan konservatif Jerman. Ia adalah kanselir pertama Republik Federal Jerman dan menjadi pimpinan partai CDU (Christliche Demokratische Union) sejak 1950 hingga 1966.

<sup>2</sup> BMBW: *Bundesministerium fuer Bildung und Wissenschaft*

<sup>3</sup> BMFT: *Bundesministerium fuer Forschung und Technologie*

<sup>4</sup> Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom ringan.

<sup>5</sup> [http://www.batan.go.id/FAQ/faq\\_reaktor.php](http://www.batan.go.id/FAQ/faq_reaktor.php) diakses pada 10 Agustus 2010, pukul 10.00 wib.

salah satu negara di kawasan Asia yang dilirik Jerman karena memiliki sumber uranium<sup>6</sup> tersebut. Atas dasar keinginan untuk mengembangkan energi nuklir tersebut, maka pada 1976 pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama pengembangan nuklir.

Kerjasama itu dapat terwujud karena adanya hubungan bilateral yang terjalin dengan baik antara kedua negara serta adanya peran yang dimainkan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (RISTEK) dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Di samping itu secara personal Habibie juga memiliki kedekatan personal dengan Jerman karena pernah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Jerman.

Kerjasama dalam bidang nuklir itulah yang kemudian menjadi dasar lahirnya kerjasama dalam bidang S&T di mana ruang lingkup yang tercakup di dalamnya menjadi lebih luas. Untuk selanjutnya kerjasama pengembangan nuklir dimasukkan ke dalam kerangka kerjasama S&T.

Perjanjian kerjasama dalam bidang S&T antara pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia telah ditandatangani sejak 20 Maret 1979<sup>7</sup>. Kerjasama tersebut bertujuan untuk melakukan dan mengembangkan riset secara bersama-sama. Kedua belah pihak secara berimbang akan memberikan sumbangan, baik keterlibatan ilmiah maupun kebutuhan anggaran. Skema pembiayaan dalam kerjasama S&T akan dibahas pada bagian tinjauan pustaka. Adapun topik-topik kerjasama yang tertuang dalam perjanjian tersebut antara lain:

(a) *Marine research and technology*, (b) *energy research and technology*, (c) *aeronautics and space research and technology*, (d) *geosciences*, (e) *social sciences and humanities*, (f) *science and technology suitable to provide a basis for industrial development* dan (g) *scientific information and documentation*<sup>8</sup>.

(a) Riset dan teknologi kelautan, (b) riset dan teknologi bidang energi, (c) riset dan teknologi kedirgantaraan dan antariksa, (d) ilmu bumi, (e) ilmu pengetahuan sosial dan humanitas, (f) sains dan

<sup>6</sup> Wawancara dengan Dr. Blässing pada 23 Juni 2010.

<sup>7</sup> Dokumen „*Agreement on co-operation in the fields of scientific research and technological development (with exchange letters)*” yang ditandatangani di Jakarta pada 20 Maret 1979.

<sup>8</sup> *ibid*

teknologi yang tepat untuk menyediakan dasar bagi pengembangan industri, dan (g) informasi dan dokumentasi ilmiah.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama tersebut, kedua negara sepakat untuk mengerjakan proyek kerjasama penelitian secara bersama-sama. Dalam dua puluh tahun pertama, jenis-jenis kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dapat dikatakan sama, di mana kegiatan riset difokuskan pada riset bioteknologi, riset kelautan, riset ilmu bumi, dirgantara dan ruang angkasa, teknik lingkungan, teknik produksi dan angkutan, riset energi serta program lainnya yang dimasukkan dalam program internasional (misalnya kegiatan seminar atau workshop yang diadakan secara bergantian di masing-masing negara).

Sedangkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, yakni sejak 2000 – 2009 terdapat beberapa program baru yang dikembangkan oleh kedua negara. Program tersebut antara lain SPICE (*Science for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystem*), studi awal untuk merancang *master plan* kelautan Indonesia, pengembangan sistem peringatan dini tsunami, riset panas bumi (*geothermal*), studi Periskop (Program Evaluasi Riset Sains Teknologi untuk Pembangunan), program intermediasi BTC (*Business Technology Center*) yang berfungsi untuk mendorong hasil-hasil riset dapat digunakan oleh usaha kecil menengah (UKM), STORMA (*Stability of Rainforest Margins in Indonesia*) serta program internasional (workshop Indonesia – Jerman dengan tema “*Research and Development Cooperation on Environmentally-Friendly Clean Energy Technologies*”, workshop dengan tema Penguatan Sistem Inovasi Nasional Indonesia, *mobility program* yaitu program pemberian beasiswa selama dua bulan kepada peneliti yang berasal dari Indonesia untuk dapat melakukan penelitian di Jerman, serta program peningkatan sumber daya manusia). Sedangkan proyek kerjasama yang masih dilanjutkan antara lain bioteknologi dan teknologi luar angkasa.

Tabel berikut akan menunjukkan perkembangan kerjasama S&T antara Jerman dan Indonesia selama 30 tahun terakhir.

**Tabel 1:**  
Bentuk-bentuk kegiatan Kerjasama S&T 1979 – 2009

No.	1979 – 1989	1990 – 1999	2000 - 2009
1.	Bioteknologi	Bioteknologi	Bioteknologi
2.	Riset kelautan	Riset kelautan	SPICE ( <i>Science for the Protection of Indonesian Coastal Ecosystem</i> )
3.	Ilmu bumi	Ilmu bumi	Studi awal untuk merancang <i>Maritime Master Plan</i>
4.	Dirgantara dan ruang angkasa	Dirgantara dan ruang angkasa	Teknologi luar angkasa
5.	Teknik lingkungan	Teknik lingkungan	Workshop Indonesia – Jerman dengan tema “ <i>Research and Development Cooperation on Environmentally-Friendly Clean Energy Technologies</i> ”
6.	Teknik produksi dan angkutan	Teknik produksi dan angkutan	Sistem Peringatan Dini Tsunami
7.	Riset Energi	Riset Energi	<i>Geothermal</i>
8.	Program internasional	Program internasional	<i>Human Resources Development</i>
9.	-	-	<i>Mobility Program</i>
10.	-	-	Studi Periskop (Program Evaluasi Riset Sains Teknologi untuk Pembangunan)
11.	-	-	<i>Business Technology Center (BTC)</i>
12.	-	-	Training Sistem Inovasi Nasional (MTCI)
13.	-	-	STORMA ( <i>Stability of Rainforest Margins in Indonesia</i> )

Sumber:

1. Dokumen 20 Tahun Kerjasama S&T Jerman Indonesia
2. Notulen rapat Inter Ministerial Meeting I-V Jerman – Indonesia

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dalam 10 tahun terakhir terdapat perkembangan fokus kerjasama yang dititikberatkan kepada perlindungan lingkungan hidup, kelautan, dukungan terhadap UKM berbasis teknologi, pengembangan energi terbarukan serta teknologi yang berbasis kemanusiaan melalui pengembangan alat pendeteksi dini bencana tsunami.

Keputusan Jerman untuk mengembangkan kerjasama S&T sedianya tidak dapat dilepaskan dari *Asia Concept 2002*<sup>9</sup> yang diterbitkan oleh BMBF pada Juni 2002. Konsep ini disusun karena Jerman melihat Asia sebagai kawasan yang paling penting dilihat dari sudut pandang politik, ekonomi dan S&T. Setelah mengalami krisis Asia pada 1997/1998 yang berdampak besar pada perekonomian dunia, situasi ekonomi di kawasan Asia saat ini telah stabil dan bahkan perekonomian di beberapa negara telah mengalami peningkatan. Jerman percaya bahwa kerjasama dengan beberapa negara tertentu di kawasan Asia menjadi semakin penting, terutama jika dilihat dari segi politik, ekonomi dan terutama dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam presentasinya yang berjudul *Science and Technology Cooperation with Developing Countries*, yang disajikan pada workshop G8-AMCOST pada Oktober 2007 di Berlin, Klaus Luther (Deputi Direktorat Jenderal kawasan Eropa dan Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan dan Riset) menyebutkan bahwa Jerman telah membuat strategi untuk internasionalisasi S&T. Strategi tersebut terdiri dari empat prioritas utama, yaitu **pertama** penguatan kerjasama riset internasional dengan para pemimpin global, **kedua** eksploitasi potensi inovasi internasional, **ketiga** intensifikasi kerjasama jangka panjang dengan negara berkembang dalam bidang pendidikan, riset dan pengembangan, dan yang **keempat** untuk memikul tanggung jawab internasional dan untuk menguasai tantangan global.

Kerjasama S&T merupakan salah satu bentuk dari beberapa kerjasama yang dipelihara oleh kedua negara sejak dibukanya hubungan bilateral antara kedua negara. Bentuk kerjasama lainnya yang juga dibina oleh kedua negara antara lain kerjasama politik, kerjasama ekonomi dan perdagangan, serta kerjasama pembangunan (*development cooperation*). Jenis-jenis kerjasama tersebut ini

---

<sup>9</sup> Lihat *Asia Concept 2002* yang diterbitkan oleh Kementerian Federal Pendidikan dan Riset Jerman (BMBF), hal. 3-4

penting untuk disajikan untuk mengetahui pola kerjasama yang dilakukan di Indonesia untuk memberi gambaran tentang relevansi antara bantuan yang satu dengan yang lainnya.

Hubungan diplomatik antara pemerintah Jerman dan Indonesia telah dibuka sejak 1952. Hubungan politik antara kedua negara selama ini berjalan dengan baik dan penuh dengan kepercayaan<sup>10</sup>. Jerman juga menghormati proses reformasi yang terjadi di Indonesia paska runtuhnya jaman Orde Baru di bawah pimpinan mantan Presiden Soeharto, walaupun pada jaman tersebut hubungan Jerman dan Indonesia bisa dikatakan sangat baik. Baiknya hubungan dalam bidang politik ini ditandai dengan banyaknya kegiatan saling kunjung pada level kenegaraan. Dalam 10 tahun terakhir Jerman memfokuskan kerjasama politiknya terhadap isu-isu demokrasi, HAM dan lingkungan hidup dan fokus tersebut juga berlaku dalam kerjasamanya dengan Indonesia.

Saat ini terdapat kurang lebih 250 perusahaan Jerman yang melakukan usahanya di Indonesia. Sebagian besar dari mereka adalah distributor produk-produk buatan Jerman, namun banyak di antara mereka yang juga melakukan kegiatan produksi di Indonesia. Salah satunya adalah pabrik KSB AG yang baru-baru ini dibuka di Cibitung. Jerman merupakan mitra dagang ketiga Indonesia setelah Jepang dan Amerika Serikat. Produk ekspor Jerman ke Indonesia menurut data dari Kementerian Luar Negeri Jerman antara lain mesin-mesin, bahan-bahan kimia setengah jadi maupun yang sudah jadi, telekomunikasi, alat-alat pembangkit listrik, komponen elektronik, metal, kendaraan bermotor dan produk-produk kimia. Sedangkan produk impor yang berasal dari Indonesia antara lain makanan seperti minyak nabati, tekstil, dan sepatu. Untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Jerman mendirikan EKONID, GTAI dan German Centre sebagai instrumen kebijakan luar negerinya untuk Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang menjadi prioritas dalam kerjasama pembangunan Jerman. Kerjasama pembangunan ini adalah instrumen kebijakan pembangunan yang disusun oleh Kementerian Federal untuk Kerjasama dan Pembangunan (BMZ) Jerman. Kerjasama ini telah dibina oleh kedua negara sejak tahun 1950an. Namun perjanjian kerjasama teknik dan keuangan baru diresmikan

---

<sup>10</sup> [www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de) yang diakses pada 18 Oktober 2010 pada pukul 11.57 wib.

pada 1984<sup>11</sup>. Dalam kerjasama ini pemerintah Jerman melalui BMZ dan pemerintah Indonesia melalui Bappenas melakukan rapat konsultasi yang dilakukan setiap tahun. Fokus kerjasama pembangunan antara pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia dalam praktiknya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut disesuaikan dengan dinamika yang terjadi baik di tingkat global, regional maupun di tingkat nasional, misalnya kerjasama pembangunan pada 2002<sup>12</sup> difokuskan pada sektor, yaitu (1) good governance, (2) kesehatan dan keluarga berencana, (3) transportasi, (4) energi, (5) lingkungan hidup dan sumber daya alam / hutan, dan (6) pendidikan dasar dan pelatihan kejuruan. Sedangkan pada 2005 terdapat tiga bidang prioritas untuk kerjasama pembangunan<sup>13</sup>, yaitu (1) mendukung kebijakan reformasi ekonomi, peningkatan perusahaan kecil dan menengah serta pelatihan kejuruan, (2) kesehatan mencakup pencegahan HIV/AIDS, dan (3) transportasi, khususnya transportasi laut dan rel kereta api. Pada 2007 juga terdapat perubahan bidang prioritas dalam kerjasama pembangunan<sup>14</sup>, antara lain (1) perlindungan iklim, (2) dukungan terhadap sektor swasta, dan (3) tata pemerintahan yang baik/desentralisasi.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi dan politik, Jerman memiliki kepentingan yang cukup besar di kawasan Asia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Kepentingan tersebut dapat terlihat dalam dokumen *Tasks of German Foreign Policy: South-East Asia, Australia, New Zealand and the Pacific Islands at the beginning of the 21<sup>st</sup> century* yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Luar Negeri di Berlin pada Mei 2002. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa kawasan Asia Pasifik dengan jumlah negara yang berada di dalamnya, perekonomiannya dan budayanya, capaian prestasinya dalam bidang sains dan teknologi serta dengan potensi pasarnya, saat ini telah menjadi fitur yang menonjol dalam kebijakan luar negeri Jerman.

---

<sup>11</sup> iMOVE, *Marktanalyse Indonesien*, (Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung, 2003), hal. 8.

<sup>12</sup> Dokumen *Indonesian – German Development Cooperation* yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jerman di Jakarta pada 2002, hal. 4.

<sup>13</sup> Dokumen Kerjasama Pembangunan Uni Eropa di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jerman di Jakarta pada 2005.

<sup>14</sup> [www.bmz.de/de/was\\_wir\\_machen/laender\\_regionen/asien/indonesien/zusammenarbeit](http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/laender_regionen/asien/indonesien/zusammenarbeit) yang diakses pada 10 Agustus 2010 pada pukul 16.00 wib.

Terkait dengan hal tersebut di atas, diperoleh informasi bahwa Jerman meningkatkan anggaran dalam kerjasama S&T kepada Indonesia, yakni sebesar € 87.113.000,- pada periode 2000 – 2009. Jumlah tersebut meningkat cukup tajam jika dibandingkan dengan anggaran yang diberikan pada 1990 – 1999 yang hanya sebesar € 37.493.867,-. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Jerman memang sedang menaruh perhatian besar dalam peningkatan kerjasama S&T dengan Indonesia.

## 1.2. PERMASALAHAN

Pada 1997/1998 Indonesia dilanda krisis keuangan yang menyebabkan krisis multidimensi. Krisis tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya gerakan sosial yang menuntut turunnya presiden kedua RI, Soeharto dari kursi kepresidenan. Selanjutnya B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden secara otomatis harus menggantikan posisi Soeharto sebagai presiden RI yang ketiga. Namun pada 1999 B.J. Habibie juga terpaksa harus turun dari kursi pemerintahan.

Disadari bahwa B.J. Habibie merupakan aktor yang memiliki peran besar dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (S&T) di Indonesia. Habibie telah menjadi simbol iptek Indonesia. Dia juga merupakan aktor yang mendukung kerjasama S&T Jerman - Indonesia. Namun turunnya B.J. Habibie dari kursi pemerintahan ternyata tidak mengurangi niat Jerman untuk tetap melanjutkan kerjasama S&T dengan Indonesia meskipun anggaran penelitian di Indonesia mengalami pemotongan secara drastis. Sebaliknya, pemerintah Jerman justru meningkatkan alokasi dana untuk membiayai proyek-proyek penelitian bersama. Berikut akan disajikan beberapa tabel yang menunjukkan adanya peningkatan alokasi bantuan kerjasama S&T yang diberikan oleh Jerman ke Indonesia.



**Tabel 2:**  
Jumlah Bantuan Kerjasama S&T yang diberikan Pemerintah Jerman  
1979 – 1999

No.	Jenis Kerjasama	1978-1989	1990-1999
1.	Bioteknologi	DM 6.467.000	DM 20.254.627
2.	Riset energi	DM 83.684.000	DM 31.407.994
3.	Ilmu Pengetahuan Geologi	DM 3.035.000	DM 3.062.616
4.	Riset Kedirgantaraan dan Antariksa	DM 3.769.000	DM 905.235
5.	Riset Kelautan	DM 3.845.000	DM 6.096.725
6.	Teknik Produksi dan Angkutan	DM 2.184.000	DM 3.674.413
7.	Teknologi Lingkungan Hidup	DM 767.000	DM 2.296.364
8.	Badan Internasional	DM 7.000.000	DM 5.618.000
9.	Lain-lain	DM 7.140.000	DM 25.666
<b>Jumlah</b>		DM 117.891.000 € 60.276.711	DM 73.331.630 € 37.493.867

Sumber:  
Dokumen 20 Tahun Kerjasama S&T Jerman Indonesia

**Tabel 3:**  
Jumlah Bantuan Kerjasama S&T yang diberikan Pemerintah Jerman  
2000 - 2009

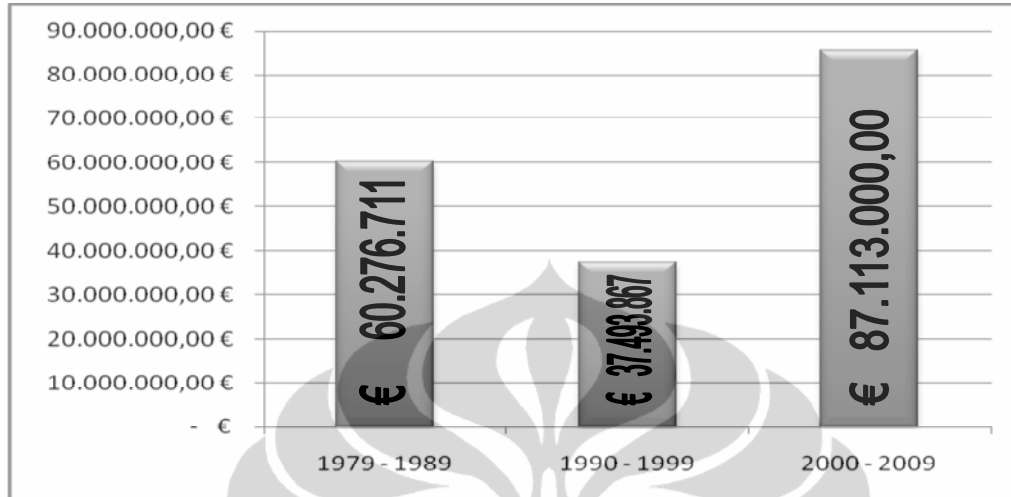
No.	Project	Sum
1	SPICE	5.500.000,00 €
2	Bioteknologi	3.280.000,00 € <sup>15</sup>
3	STORMA	3.700.000,00 €
4	<i>Tsunami Early Warning System</i>	55.000.000,00 € <sup>16</sup>
5	<i>Geothermal</i>	8.800.000,00 € <sup>17</sup>
6	<i>Geo-technology</i>	1.300.000,00 €
7	<i>Integrated Water Resources Management</i>	6.000.000,00 €
8	Periskop Study	3.000.000,00 €
9	Kerjasama Internasional	2.533.000,00 €
<b>Total Euro</b>		<b>87.113.000,00 €</b>

<sup>15</sup> Wawancara dengan Dr. Jens Schiffers, BMBF pada 23 Juni 2010.

<sup>16</sup> Data diperoleh dari Dr. Jörn Lauterjung, GFZ melalui email yang diterima pada 25 Juni 2010.

<sup>17</sup> Data diperoleh dari Dr. Kemal Erbas, Helmholtz Centre Potsdam GFZ melalui email yang diterima pada 25 Juni 2010.

**Tabel 4:**  
Grafik Jumlah Bantuan Kerjasama S&T yang diberikan Pemerintah Jerman  
1979 – 2009



Melalui tabel 2, 3 dan 4 dapat kita lihat bahwa alokasi dana bantuan yang disediakan Jerman untuk kerjasama S&T dengan Indonesia mengalami fase naik turun. Pada periode 1978 – 1989 jumlah dana yang dialokasikan oleh Jerman sebesar € 60.276.711,- sedangkan pada periode 1990 – 1999 alokasi dana tersebut mengalami penurunan hampir sebesar lima puluh persen yakni menjadi € 37.493.867,-. Baru pada 2000 – 2009 jumlah dana yang diberikan oleh Jerman kepada Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar € 87.113.000,- .

Sehingga menjadi menarik untuk dipertanyakan mengapa pada periode 2000 – 2009 Jerman meningkatkan alokasi dananya untuk membiayai kerjasama S&T dengan Indonesia, sedangkan pada saat yang sama pemerintah Indonesia harus menurunkan anggaran untuk penelitian karena imbas dari krisis ekonomi yang melanda pada 1997/1998.

### 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang motivasi Jerman meningkatkan anggaran kerjasama S&T dengan Indonesia pada periode 2000 - 2009. Diharapkan melalui penelitian ini akan ditemukan motivasi dibalik

meningkatnya anggaran tersebut. Dengan mengetahui motivasi yang dimiliki oleh Jerman, diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmiah tentang hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara dan secara khusus akan dapat menambah pengetahuan tentang kerjasama S&T yang dibina oleh Jerman dan Indonesia.

#### 1.4. KERANGKA PEMIKIRAN

##### 1.4.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini akan merangkum berbagai tulisan yang membahas motivasi atau alasan-alasan yang mendorong negara-negara maju untuk memberikan bantuannya kepada negara-negara berkembang.

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong negara-negara maju untuk memberikan bantuannya kepada negara-negara berkembang. Dua diantara alasan tersebut ialah untuk mempererat hubungan politik di antara negara yang memberi dan menerima bantuan serta untuk membendung pengaruh ideologi yang mungkin saja bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh negara pemberi bantuan<sup>18</sup>.

Paul Hoebink (1999) mengemukakan empat motif yang dimiliki oleh negara-negara/lembaga donor pada umumnya dalam memberikan bantuan luar negerinya<sup>19</sup>. **Pertama** motif politik/strategi. Bantuan dalam hal ini diberikan untuk mendapatkan aliansi strategis dalam bidang militer. Dalam bentuk yang lebih halus bantuan diberikan untuk membina persahabatan di seluruh dunia untuk mendapatkan akses dari negara yang dituju di negara-negara berkembang. Motif strategi politik ini dapat dengan jelas tergambar dari seleksi para donor terhadap negara-negara penerima bantuan. Karena itu, hanya negara yang memiliki kedekatan ideologi politik dan berada dalam posisi geografis yang bagus, yang kemungkinan akan beruntung mendapatkan bantuan luar negeri dari negara donor ini.

---

<sup>18</sup> Lihat Mahindun Dhiani Melda Harapan “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia, hal 11.

<sup>19</sup> Dikutip oleh Edison Muchlis M. dalam tulisannya yang berjudul *Bantuan Luar Negeri Uni Eropa (UE) kepada Indonesia*.

**Kedua** motif ekonomi dan perdagangan. Kepentingan utama yang dilihat dalam motif ekonomi dan perdagangan ini adalah cara bagaimana bantuan digunakan dalam rangka mengembangkan ekspor dan investasi dari perusahaan-perusahaan di negara donor termasuk untuk menjamin pasar donor dalam bentuk suplai kebutuhan bahan baku. Bantuan dalam hal ini dapat digunakan untuk menciptakan perjanjian yang berkaitan dengan pengapalan dan angkutan udara. Bantuan keuangan juga ditujukan sebagai instrumen untuk menghindari resesi ekonomi di negara donor dengan membuka outlet untuk sektor barang dan jasa di sektor-sektor industri yang memanas seperti industri transportasi, pengapalan dan baja. Bantuan juga ditujukan untuk mendukung investasi melalui pembiayaan pilot proyek, *feasibility study* atau jaminan atas resiko ekonomi dan politik. Sebagian besar donor memiliki motivasi seperti ini termasuk juga bantuan khusus bagi pendanaan sebuah perusahaan di negara penerima.

**Ketiga** motif etika dan kemanusiaan. Motif ini juga kemudian dikembangkan oleh penganut *social democratic* atau pemikiran sosialis yang memiliki solidaritas terhadap yang miskin. Loyalitas terhadap PBB, kontribusi bagi kegiatan penjaga perdamaian dan memberikan jumlah yang banyak untuk bantuan luar negeri merupakan karakteristik dari penganut pandangan internasionalisme ini.

**Keempat** beberapa masalah lingkungan seperti masalah lapisan ozon dan efek rumah kaca yang melampaui batas nasional dan karenanya menjadi masalah global. Kekurangan dana di negara berkembang untuk menanggulangi masalah lingkungan ini telah melahirkan kebutuhan akan bantuan luar negeri untuk mengatasinya.

Secara ekonomi hal tersebut dapat diartikan bahwa bahwa meskipun negara berkembang dipandang akan sulit untuk melunasi kewajiban utang-utangnya, namun mereka dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk membangun apabila negara kreditur memiliki kepentingan terhadap negara berkembang tersebut jika dilihat dari sudut politik, pertahanan, keamanan dan ideologi<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> *ibid*

Motivasi lain yang menjadi dasar bagi negara kreditur untuk menyalurkan dananya ke negara berkembang ialah atas pertimbangan kemungkinan pengembangan pasar hasil industrinya. Lebih lanjut Harapan (2007:14) menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan arus dana pinjaman terus mengalir: *pertama* peluang investasi asing di negara-negara berkembang jika dilihat dari sudut pandang ekonomi akan sangat menguntungkan, sebab masih banyak terdapat kawasan yang kaya sumber daya alam yang masih belum dieksploitasi, *kedua* negara-negara di luar Inggris seperti AS, Kanada, Argentina dan Australia merupakan negara yang masih jarang penduduknya sehingga migrasi penduduk yang terjadi di negara-negara tersebut bila diimbangi dengan tersedianya modal untuk investasi merupakan peluang yang sangat menguntungkan.

Dalam dokumen *Indonesian-German Development Cooperation* yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia pada 2002 disebutkan bahwa terdapat beberapa motivasi yang dimiliki Jerman untuk memberikan bantuan pembangunan. Yang *pertama* ialah adanya dorongan moral yang dimiliki Jerman untuk membantu negara lain; *kedua* kepentingan Jerman secara umum, misalnya dalam prospek jangka panjang untuk perdamaian dan stabilitas keamanan untuk kesejahteraan seluruh bangsa; *ketiga* terkait dengan perekonomian Jerman yang sangat berorientasi pada ekspor; *keempat* Jerman memiliki motivasi untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan global. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa kebijakan pembangunan Jerman bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial di negara-negara berkembang.

Terkait dengan hubungan Jerman – Indonesia, Bahrin dalam makalahnya yang berjudul Hubungan Politik Indonesia – Republik Federal Jerman (2000) menyebutkan bahwa hubungan bilateral di berbagai bidang yang dijalin oleh kedua negara dapat dikatakan mengalami peningkatan. Hal itu merupakan keinginan dan kepentingan masing-masing negara untuk meraih manfaat yang sebesar-besarnya dari hubungan tersebut. Dalam bidang ekonomi Jerman memberikan bantuan teknik dan pembangunan kepada Indonesia dengan maksud untuk ikut berpartisipasi memacu laju pembangunan ekonomi. Dalam hal ini Jerman memiliki motivasi ekonomi terhadap situasi Indonesia yang stabil dan

makmur, sebab situasi yang aman merupakan jaminan bagi kelangsungan pasar hasil industri Jerman di Indonesia pada khususnya dan di kawasan ASEAN pada umumnya. Jika dilihat dari motivasi politik, situasi Indonesia yang stabil dan makmur dapat menjadi stabilisator di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, pada Juni 2002 BMBF telah menerbitkan *Asia Concept 2002*<sup>21</sup>. Konsep ini disusun karena Jerman melihat Asia sebagai kawasan yang paling penting dilihat dari sudut pandang politik, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah mengalami krisis Asia pada 1997/1998 yang berdampak besar pada perekonomian dunia, situasi ekonomi di kawasan Asia saat ini telah stabil dan bahkan perekonomian di beberapa negara telah mengalami peningkatan. Jerman percaya bahwa kerjasama dengan beberapa negara tertentu di kawasan Asia menjadi semakin penting, terutama jika dilihat dari segi politik, ekonomi dan terutama dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkait dengan adanya beberapa permintaan yang besar dari kawasan Asia, antara lain *pertama* untuk produk-produk berteknologi dan khususnya pendidikan, *kedua* pengembangan infrastruktur, serta *ketiga* modal investasi yang berkaitan dengan peningkatan industrialisasi. Pembangunan ekonomi internasional ditandai dengan adanya perpaduan antara persaingan dan kerjasama dalam konteks pertumbuhan globalisasi. Aspek-aspek berikut memainkan peran penting dalam kerjasama yang dibiayai langsung oleh BMBF: *pertama* perspektif pendidikan dan kondisi kebijakan riset. Pendidikan dan riset tergantung pada adanya tukar menukar dan kolaborasi dengan pusat kompetensi terpenting di dunia. Perbedaan aktor dalam kerjasama internasional tentunya menuntut adanya pendekatan yang berbeda. Dalam aturannya, BMBF hanya bekerjasama dengan negara-negara yang tertarik dengan proyek ilmu pengetahuan Jerman yang dibiayai oleh BMBF; *kedua* perspektif ekonomi. Kerjasama antar lembaga penelitian dengan berbagai negara merupakan persyaratan untuk pengembangan inovasi dan untuk membuka pasar-pasar baru. Hal tersebut akan dapat memudahkan masuknya produk-produk baru ke dalam pasar dunia. Dalam banyak hal, kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh BMBF berorientasi pada pasar. Oleh karena itu kepentingan ekonomi dan

---

<sup>21</sup> Lihat *Asia Concept 2002* yang diterbitkan oleh Kementerian Federal Pendidikan dan Riset Jerman (BMBF), hal. 3-4

kepentingan industri juga memainkan peran yang penting dalam kerjasama dan Jerman berpartisipasi secara aktif untuk industri Jerman dalam Komite Asia Pasifik; *ketiga* kepentingan politik. Jerman menerima tanggung jawab internasionalnya dalam kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan dan riset. Kerjasama tersebut memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah global dan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya bagi mitra kerjasama. Melalui kerjasama tersebut, negara-negara mitra di dunia akan menghargai Jerman. Di sisi lain Jerman juga membutuhkan mitra internasional dalam bidang ilmu pengetahuan, industri dan politik yang mengenal dan menghargai Jerman.

Sejak runtuhnya rezim Suharto tahun 1998, Indonesia di mata BMZ dinilai telah menjalankan langkah-langkah penting ke arah demokratisasi. Salah satu contoh terpenting menurut BMZ adalah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis di propinsi Aceh<sup>22</sup>. Kesepakatan tersebut mengakhiri konflik puluhan tahun yang telah mengorbankan lebih dari 10,000 ribu jiwa manusia. Terorisme nyatanya tidak berhasil mengganggu jalinan kerjasama negara Muslim terbesar dengan mitra kerja internasionalnya. Demikian disimpulkan kepala bagian Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), Michael Bohnet, sehubungan dengan negosiasi antar pemerintah Indonesia-Jerman yang berakhir pada 12 Desember 2002 di Bonn. Pada negosiasi tersebut pemerintah Jerman menjanjikan pemerintah Indonesia dana sebesar 28,5 juta Euro untuk mendukung reformasi di sektor perekonomian, kesehatan dan transportasi. Untuk tahun 2003 diberikan pula dana khusus sejumlah 1,5 juta Euro untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dan paket anti teror, serta dana tambahan sebanyak 2,2 juta Euro guna reformasi administrasi dan mendukung usaha memerangi korupsi. Dengannya Jerman berniat mendukung Indonesia dalam menyelaraskan keinginannya memperkuat otonomi dan menjaga integritas bangsa sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam bantuannya, Jerman mengutamakan langkah-langkah reformasi di sektor badan-badan keuangan kecil, produksi usaha kecil dan menengah yang ekologis dan bantuan finansial di tingkat propinsi.

---

<sup>22</sup> Laporan pers BMZ (The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development) tentang Jalinan Kerjasama Pembangunan Jerman – Indonesia Diperkuat, 12 Desember 2002.

Terjadinya gempa bumi yang diikuti oleh bencana tsunami yang salah satunya melanda Aceh pada 26 Desember 2004 telah menggugah simpati masyarakat internasional untuk memberikan bantuan kepada korban bencana. Dalam tempo sebelas hari setelah terjadi bencana tersebut, lebih dari 27 pemimpin negara dan organisasi internasional bersidang pada 6 Januari 2005, di Jakarta dalam KTT khusus ASEAN. Hal tersebut menunjukkan semangat kerjasama internasional yang luar biasa untuk membantu Indonesia dalam menganggulangi bencana, baik untuk tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi serta juga upaya minigasi dan peringatan dini tsunami di masa depan. Bentuk bantuan yang paling langsung dan lebih menguntungkan adalah hibah. Jerman menunjukkan komitmennya dengan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Indonesia atas terjadinya bencana tersebut dengan menyediakan dana sebesar € 500 juta untuk semua negara yang terkena bencana terutama Indonesia dan Sri Lanka, di mana jumlah tersebut terdiri dari hibah dan pinjaman lunak<sup>23</sup>. Bentuk tindak lanjut dari komitmen internasional untuk membantu Indonesia dan negara di kawasan samudera Hindia yang terkena bencana tsunami ialah pengembangan alat pendeteksi dini tsunami, baik pada tingkat nasional yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia maupun tingkat regional yang mencakup seluruh negara tepian samudera Hindia. Kanselir Jerman pada saat itu Gerhard Schroeder memberikan perhatian pribadi yang besar untuk membantu Indonesia. Perhatian tersebut ditunjukkan dengan mengirimkan ahli-ahli geologi ke Indonesia pada Februari 2005 untuk mengadakan konferensi internasional mengenai *Tsunami Warning System* di Indonesia (TEWS).

Pada 11 November 2008, Thomas Rachel (*Parliamentary State Secretary of Federal Ministry of Education and Research, Germany*) mengikuti acara peresmian pusat TEWS di Jakarta yang juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kesempatan itu Rachel menyebutkan bahwa Jerman menyumbangkan kontribusi yang besar untuk perlindungan bencana tsunami di Indonesia dan di kawasan samudera Hindia. Pusat TEWS memiliki fungsi untuk menyatukan proses sains dan teknologi

---

<sup>23</sup> Lihat paparan lisan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Dr. N. Hassan Wirajuda dalam „Refleksi 2004 dan Proyeksi 2005“ yang disampaikan di Jakarta pada 19 Januari 2005.



terbaru untuk menciptakan alat peringatan dini tsunami yang unik di dunia. Teknologi tersebut akan memungkinkan pihak yang berwenang (pemerintah) untuk dapat memberikan informasi yang tepat tentang kemungkinan terjadinya bencana tsunami. Jerman mengucurkan dana sebesar € 45 juta untuk Indonesia, di mana dana tersebut digunakan untuk mengembangkan teknologi pendeteksi tsunami dan *capacity building*. BMBF akan menyediakan tambahan sebesar € 6 juta sampai dengan 2010 untuk optimasi sistem dan transfer pengetahuan khususnya untuk operasionalisasi sistem yang dibuat<sup>24</sup>.

Jerman sebagaimana yang kita ketahui merupakan bagian dari masyarakat Uni Eropa (UE). Sebagai bagian dari masyarakat internasional UE juga mengikuti perkembangan internasional dan menjalankan keputusan yang diberlakukan oleh PBB yang menyebutkan bahwa bantuan pembangunan yang diberikan tidak semata-mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Negara penerima semata tetapi lebih daripada itu ialah untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa penerima bantuan. Sasaran peningkatan hidup tersebut mencakup pendidikan, masalah anak-anak, masalah lingkungan, HAM, kependudukan serta kedudukan perempuan<sup>25</sup>. Jika diperhatikan, motivasi yang dimiliki oleh Negara industri maju kepada Negara sedang berkembang seolah-olah untuk maksud memperbaiki perekonomian penerima bantuan. Akan tetapi di balik bantuan dengan alasan moral dan kemanusiaan tersebut ternyata terkandung motivasi untuk mencari keuntungan baik di bidang politik maupun bidang ekonomi. Menurut Michael P. Todaro yang dikutip oleh Sitohang, negara industri memiliki maksud dan tujuan berupa *self-interest* politik, strategi dan/atau ekonomi dalam memberikan bantuannya.

Berbagai tulisan di atas berupaya untuk mengungkapkan motivasi yang dimiliki suatu negara dalam memberikan bantuannya kepada negara lain. Dalam tinjauan pustaka ini juga memperlihatkan motivasi yang dimiliki Jerman ketika ia memberikan bantuannya kepada Indonesia khususnya dalam kerjasama S&T.

---

<sup>24</sup> Lihat *Press Release* yang dikeluarkan oleh Kementerian Federal Bidang Pendidikan dan Riset, Jerman (BMBF) pada 11 November 2008.

<sup>25</sup> Lihat tulisan Japanton Sitohang yang berjudul „Tekanan Politik UE dan Kebijakan Pembangunan Indonesia“.

### 1.4.2. Kerangka Teori

Dalam bantuan kerjasama S&T yang diberikan Jerman kepada Indonesia pada 2000 – 2009 terdapat dua konsep besar yang perlu dipahami sebagai awal penelitian ini. Konsep-konsep tersebut adalah konsep bantuan yang berupa hibah dan konsep etika dalam kebijakan luar negeri.

Kebijakan luar negeri pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah suatu negara berdaulat untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik dunia demi mencapai tujuan nasionalnya<sup>26</sup>.

Mark R. Amstutz dalam bukunya yang berjudul *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics* menyebutkan definisi kebijakan luar negeri sebagai aksi eksplisit dan implisit oleh pejabat pemerintah yang dibuat untuk mempromosikan kepentingan nasional di atas batas teritori negara<sup>27</sup>. Terdapat tiga penekanan, yakni tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan suatu negara. Sehingga semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor-aktor lain di luar batas wilayahnya.

James N. Rosenau menguraikan konsep kebijakan luar negeri ke dalam tiga pengertian yang berbeda baik substansi maupun cakupannya. Pertama kebijakan luar negeri dipahami sebagai seperangkat prinsip atau orientasi umum yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal. Rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah atau tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.

Sedangkan teori tentang etika dalam kebijakan luar negeri mulai diperbincangkan pada November 1998 pada konferensi yang diadakan oleh *London School of Economics Department of International Relations*. Konferensi

<sup>26</sup> Politik Global dalam Teori dan Praktik yang ditulis oleh Aleksius Jemadu. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.

<sup>27</sup> Mark R. Amstutz (1995). *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*. Dubuque Brown & Benchmark. hal. 146.

tersebut mengambil tema *'Ethics and Foreign Policy'* (Etika dan Kebijakan Luar Negeri). Tema tersebut dipilih sebagai refleksi terhadap isu-isu dalam agenda Kebijakan Luar Negeri yang mengemukakan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah seharusnya bertindak dalam Hubungan Internasional. Promosi hak asasi manusia (HAM), pelarangan penjualan senjata kepada daerah-daerah yang keamanannya tidak stabil atau kepada negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan khususnya untuk tujuan intervensi kemanusiaan adalah isu-isu yang saat ini menjadi topik pembicaraan hangat di antara para politisi dan pemerintah. Ada tiga teori tentang etika dalam kebijakan luar negeri yang akan dikemukakan di sini. Yang pertama teori yang dikemukakan oleh Chris Brown tentang *'Ethics, interests and foreign policy'*. Brown mengawali teorinya dengan menyebutkan bahwa etika dalam kebijakan luar negeri muncul pertama kali pada 1997 ketika Robin Cook menempati jabatan sebagai *Foreign Secretary*, Inggris. Dalam *Mission Statement* Cook yang dikutip oleh Brown disebutkan bahwa:

*The mission of the Foreign and Commonwealth Office is to promote the national interests of the UK and contribute to a strong international community. ... We shall pursue that mission to secure for Britain four benefits through our foreign policy, the four benefits being security, prosperity, the quality of life and mutual respects. We shall work through our international forums and bilateral relationships to spread the values of human rights, civil liberties and democracy which we demand for ourselves".*

Misi Kantor Luar Negeri ialah untuk mempromosikan kepentingan dalam negeri Inggris dan berkontribusi dalam komunitas internasional yang kuat. ... Kita harus melanjutkan misi tersebut untuk melindungi empat kepentingan Inggris melalui kebijakan luar negeri kita, keempat kepentingan tersebut yaitu keamanan, kesejahteraan, kualitas hidup dan saling menghormati. Kita sudah seharusnya bekerja melalui forum-forum internasional kita dan hubungan bilateral untuk menyebarkan nilai-nilai HAM, kebebasan masyarakat sipil dan demokrasi untuk memenuhi permintaan kita sendiri.

Brown mengawali teorinya dengan mengatakan, ketika kita menyebutkan bahwa tingkah laku seseorang dapat dikatakan beretika ialah pada saat kita menganggap bahwa seseorang itu memiliki moral. Teori marxisme dan teori yang mempertanyakan apakah 'orang' dalam negara mampu bertindak sesuai dengan

etika tidak dimasukkan dalam teorinya. Brown menyebutkan bahwa prinsip moral di mana di dalamnya terdapat tindakan yang beretika hanyalah sebuah pendekatan semata. Bagi beberapa pihak tindakan yang beretika itu berarti tindakan yang sesuai dengan aturan-aturan moral. Aturan-aturan tersebut muncul dengan sendirinya berdasarkan hukum alam. Bagi Brown, beretika ialah adanya kesadaran dan perasaan sensitif terhadap kepentingan orang lain namun tidak mengingkari kepentingannya sendiri dan hal ini bukanlah sebuah perintah. Ada keadaan di mana seseorang merasa harus mengorbankan diri, dan dalam kode etik keadaan tersebut disebut sebagai 'supererogatory', yang berarti bahwa sesuatu itu akan lebih baik jika dilakukan namun juga tidak salah jika tidak dilakukan. Brown pada dasarnya menolak pemikiran yang menyebutkan bahwa ada antitesis antara etika dan kepentingan dalam kebijakan luar negeri sebuah negara. Dia berargumen bahwa apa yang saat ini diproklamlirkan sebagai kebijakan luar negeri yang beretika bukanlah sesuatu yang baru. Negara-negara harus memperhitungkan syarat-syarat bagi keanggotaan masyarakat internasional. Menurut Brown tugas pokok pembuat kebijakan adalah untuk memenuhi kepentingan rakyat mereka namun juga sebagai kewajiban yang lebih luas bagi negara-negara lain dan melalui negara-negara yang lain. Kewajiban yang lebih luas tersebut meliputi: (1) dengan tidak memberikan suara (abstain) kepada tindakan paksaan untuk melakukan tindakan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, (2) taat terhadap hukum internasional, (3) kerjasama dengan negara lain selama itu memungkinkan, dan (4) intervensi kemanusiaan untuk menghentikan pelanggaran terhadap martabat manusia. Sehingga, teori yang dia kemukakan tetap mengacu kepada empat prinsip kebijakan luar negeri Inggris, yakni keamanan, kesejahteraan, kualitas hidup dan saling menghormati

Sedangkan Mervyn Frost dalam teorinya *'The ethics of humanitarian intervention: protecting civilians to make democratic citizenship possible'* menyebutkan bahwa salah satu isu yang paling kontroversial dalam agenda kebijakan luar negeri pada 1990 adalah intervensi kemanusiaan. Frost menyebutkan bahwa ada kebenaran moral untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Dia menyebutkan bahwa terdapat dua norma-norma intervensi dalam hubungan internasional, yaitu (1) tuntutan terhadap negara-negara untuk

tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain, dan (2) negara harus membiarkan kebebasan kepada warga sipil. Frost berargumen bahwa observasi kepada norma-norma non-intervensi akan dapat diaplikasikan kepada negara-negara yang mampu menunjukkan penghormatan kepada norma-norma non intervensi yang terkait dengan masyarakat sipil. Apabila negara tidak dapat menghormatinya, maka norma-norma non-intervensi internasional tidak dapat dijalankan. Intervensi kemanusiaan harus ditujukan untuk dapat melindungi masyarakat sipil dan untuk meyakinkan bahwa tidak ada intervensi oleh pemerintah kepada warga sipil. Anggota masyarakat internasional dapat menggunakan negara, organisasi internasional atau kekuatan sosial lainnya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak-hak yang diberikan.

Sedangkan Molly Cochran dalam tulisannya yang berjudul '*A pragmatist perspective on ethical foreign policy*' memberi ilustrasi bahwa munculnya dilema yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan saat ini adalah fenomena baru. Dia memberi argumen bahwa pragmatisme menawarkan pedoman yang membangun sebuah kebijakan luar negeri yang beretika di awal abad 20 sebagaimana yang terjadi saat ini. Cochran menolak pandangan yang kontroversial yang menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri seluruhnya harus beretika atau tidak beretika. Dia menyarankan bahwa pragmatisme memberikan jalan tengah bahwa pembatasan terhadap konsep etika telah ketinggalan jaman. Hal tersebut memberi ruang gerak baru untuk solusi-solusi kreatif bagi masalah-masalah spesifik dalam hubungan internasional. Bagi orang pragmatis, etika harus disusun secara demokratis melalui sebuah permusyawaratan yang disetujui dan memiliki proses. Para pembuat kebijakan harus terbuka terhadap aktivitas transnasional, terhadap suara-suara NGO dan pergerakan sosial.

Berdasarkan pandangan beberapa pencetus teori tentang kebijakan luar negeri di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa kebijakan luar negeri merupakan serangkaian rencana dan komitmen yang diputuskan oleh pemerintah suatu negara yang dijadikan dasar oleh negara itu untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan melalui berbagai macam kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral, misalnya kerjasama dalam bidang perdagangan, pendidikan,

kebudayaan maupun kerjasama dalam bidang S&T. Turunan dari komitmen kerjasama tersebut dapat berupa penurunan bea masuk untuk perdagangan, pemberian bantuan yang berupa hibah (*grant*) maupun pinjaman (*loan*).

Untuk selanjutnya teori yang akan digunakan untuk menganalisis tulisan ini ialah teori tentang etika dalam kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Brown.

Konsep selanjutnya yang akan digunakan adalah konsep hibah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia „hibah“ berarti pemberian dengan sukareala) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sementara menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA.) 2000, penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri<sup>28</sup>.

Menurut Kurniawan hibah dapat diklasifikasikan menurut skema atau bentuknya terdiri atas, *pertama* hibah dalam bentuk *cash*, hibah ini sangat terbatas dan diberikan kepada negara-negara yang sangat miskin (pendapatan per kapita per tahun kurang dari USD 200). Tujuannya ialah untuk memperbaiki negara pembayaran negara-negara tersebut. Indonesia ternyata pernah dua kali menerima hibah dalam skema ini meski Indonesia pada saat menerimanya tidak tergolong sebagai negara sangat miskin. Cara penarikan dana hibah tersebut dengan menunjukkan bukti impor atas komoditas yang *eligible* sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi hibah; *kedua* hibah dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka bantuan proyek (*project assistance*) atau kerjasama keuangan (*financial cooperation*). Hibah dalam bentuk barang dan jasa ini masih diklasifikasikan lagi ke dalam (1) hibah dalam bentuk barang dan jasa yang berdiri sendiri serta (2) hibah dalam bentuk barang dan jasa untuk mendukung atau sebagai bagian *project assistance* yang dibiayai pinjaman. Hibah dalam bentuk barang dan jasa yang berdiri sendiri sama dengan pinjaman luar negeri untuk proyek-proyek pembangunan (pengadaan barang dan jasa). Yang membedakan ialah sumber dana dalam skema ini tidak perlu dikembalikan. Pengadaan barang dan jasa dalam

---

<sup>28</sup> Dikutip dari tulisan Kurniawan Ariadi yang berjudul Hibah Luar Negeri, APBN dan “Grant Trap” yang dimuat dalam majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 23 Th 2001.

rangka hibah skema ini diproses sebagaimana halnya dalam rangka pinjaman luar negeri. Sedangkan hibah dalam bentuk barang dan jasa untuk mendukung atau sebagai bagian *project assistance* yang dibiayai pinjaman merupakan hibah yang berupa dana dan diberikan bersama-sama dengan pinjaman untuk pembiayaan suatu proyek pengadaan barang dan jasa. Meskipun hibah diberikan berupa dana, namun pembayaran tetap dilakukan oleh pihak pemberi hibah sesuai dengan progress proyek melalui mekanisme *direct payment*. Pihak peminjam (Pemerintah Indonesia) hanya menerima barang dan jasa. Skema bentuk hibah yang *ketiga* yaitu hibah dalam rangka bantuan teknik (*technical assistance*) atau kerjasama teknik (*technical cooperation*). Hibah dalam bentuk ini dibagi menjadi (1) hibah untuk mendukung proyek-proyek yang dibiayai pinjaman. Hibah bentuk ini umumnya berupa studi untuk persiapan, *appraisal* ataupun untuk *monitoring* proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pinjaman. Dalam hal ini pihak pemberi dana menyediakan tenaga ahli dan membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan tenaga ahli tersebut. Pihak penerima hibah hanya memfasilitasi kegiatan tenaga-tenaga ahli tersebut dan menerima hasil studi, *appraisal* atau *monitoring*, (2) hibah dalam rangka *technical assistance* yang berdiri sendiri. Hibah dalam skema ini pada dasarnya berupa penyediaan tenaga ahli dan atau konsultan untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan tertentu. Lingkup pekerjaan konsultan berbeda-beda tergantung pada jenis proyek atau kegiatan dan kontrak yang mengikatnya. Hibah bentuk inilah yang lazim diberikan oleh semua negara dan lembaga donor. Dalam skema ini dimungkinkan adanya pengadaan barang namun sifatnya hanya mendukung pekerjaan tenaga ahli seperti pengadaan mobil, mesin fotokopi dan peralatan kerja lainnya. Semua pembiayaan atau pembayaran tenaga ahli dilakukan oleh pihak donor. Penerima hibah umumnya hanya menyediakan fasilitas pendukung (*in kind*) seperti ruang kantor, personalia pendamping serta layanan untuk mendukung tenaga ahli tersebut. (3) beasiswa dan pelatihan. Bentuk hibah yang juga lazim diberikan adalah beasiswa untuk belajar di dalam ataupun di luar negeri, pelatihan di dalam dan di luar negeri, magang di negara atau lembaga pemberi hibah dan pertukaran pemuda. Masalah administrasi keuangan skema ini dikelola langsung oleh negara atau lembaga pemberi hibah.

Dalam kerjasama S&T dengan Indonesia, Jerman memberikan bantuan berupa hibah dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka bantuan proyek (*project assistance*) di mana sumber dana dalam skema ini tidak perlu dikembalikan oleh Indonesia. Sebagai contoh untuk skema bantuan ini ialah kerjasama dalam pengembangan alat pendeteksi dini bencana tsunami, di mana Jerman telah menghibahkan beberapa alat dan bantuan teknik untuk pengembangan alat pendeteksi tersebut (lihat bab 3). Skema hibah lainnya yang diberikan oleh Jerman adalah penyediaan tenaga ahli dan atau konsultan untuk melaksanakan suatu proyek kerjasama di Indonesia. Lingkup pekerjaan konsultan tersebut disesuaikan dengan proyek kerjasama yang sedang berjalan. Saat ini Jerman menempatkan satu tenaga ahli di Ristek untuk membantu program BTC. Dalam skema ini Jerman memberikan tunjangan dalam pengadaan barang yang sifatnya mendukung pekerjaan tenaga ahli seperti pengadaan mobil, mesin fotokopi dan peralatan kerja lainnya. Semua pembiayaan atau pembayaran tenaga ahli tersebut dilakukan oleh pihak donor sedangkan Ristek hanya menyediakan fasilitas pendukung (*in kind*) seperti ruang kantor, personalia pendamping serta layanan untuk mendukung tenaga ahli tersebut serta dukungan staf Ristek untuk menjalankan tugasnya di Indonesia. Hibah lainnya yang diberikan oleh Jerman adalah pelatihan dan pertukaran peneliti baik yang berasal dari Jerman maupun yang berasal dari Indonesia sesuai dengan proyek yang sedang berjalan serta program magang bagi pegawai kementerian. Untuk saat ini sudah ada beberapa pegawai Ristek yang magang selama tiga bulan di BMBF. Masalah administrasi keuangan skema ini dikelola langsung oleh Jerman. Dengan demikian pembahasan mengenai skema hibah ini akan menjadi variabel independen dalam tesis ini.

#### 1.5. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini menggambarkan adanya interaksi dari dua jenis variabel yang berbeda, yakni variabel independen and variabel dependen.

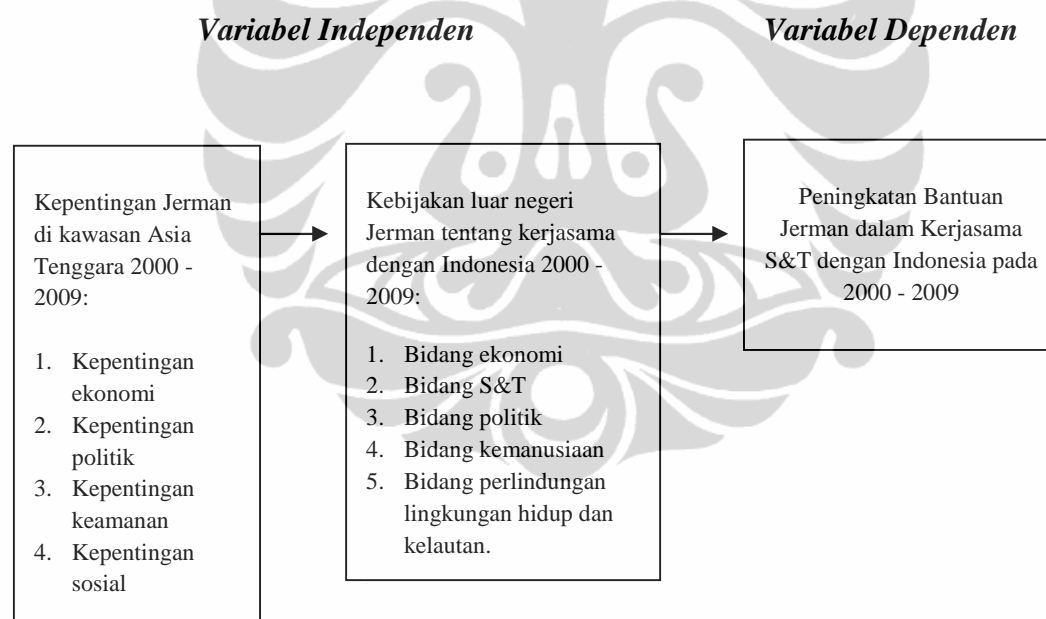
Variabel-variabel independen dari tesis ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan Jerman termotivasi untuk meningkatkan anggaran kerjasama S&T



ke Indonesia dalam kurun waktu 2000 – 2009. Kepentingan Jerman di Indonesia akan menjadi faktor internal yang membentuk kebijakan luar negeri Jerman untuk meningkatkan anggaran kerjasama tersebut. Sehingga faktor internal tersebut menjadi salah satu variabel independen. Variabel independen lainnya adalah kebijakan luar negeri Jerman tentang bantuan kerjasama bilateral dengan negara sedang berkembang.

Adapun variabel dependen dari penelitian ini adalah motivasi peningkatan anggaran kerjasama oleh pemerintah Jerman terhadap Indonesia pada 2000 – 2009. Variabel dependen dalam tesis ini memperlihatkan adanya suatu interaksi antara variabel independen dan dependen untuk menghasilkan kebijakan tersebut.

## 1.6 MODEL ANALISIS



### 1.7. HIPOTESA

1. Jerman memiliki kepentingan di Indonesia yang menyebabkan Jerman membuat kebijakan luar negeri untuk meningkatkan bantuan kerjasama S&T-nya dengan Indonesia pada 2000 – 2009.
2. Jerman memiliki Kebijakan Luar Negeri tentang kerjasama dengan Indonesia. Kebijakan tersebut dijadikan dasar bagi Jerman untuk meningkatkan bantuan kerjasama S&T dengan Indonesia pada 2000 – 2009.
3. Jerman memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Atas dasar kepentingan tersebut Jerman membuat kebijakan luar negeri tentang kerjasama dengan Indonesia pada 2000 – 2009. Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan luar negeri tersebut, Jerman meningkatkan bantuan kerjasama S&T dengan Indonesia pada 2000 – 2009.

### 1.8. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan adalah eksplanatif yang akan menggunakan unit analisis kebijakan luar negeri Jerman yang memotivasi negara tersebut meningkatkan anggaran dalam kerjasama S&T dengan Indonesia pada 2000 – 2009. Data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder baik kualitatif maupun kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui interview dengan narasumber, dokumen-dokumen maupun publikasi resmi mempunyai kaitan dengan topik tesis ini.

Data tersebut diperoleh dari lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga riset Jerman seperti BMBF (Kementerian Federal bidang Riset dan Penelitian), VDI/VDE-IT, Jerman, Kementerian Luar Negeri Jerman, lembaga riset Jerman seperti GFZ, Jülich Institute, DAAD, serta dari lembaga-lembaga pemerintah Indonesia, seperti Ristek (Kementerian Riset dan Teknologi), Kedutaan Besar untuk Indonesia di Berlin, lembaga riset seperti BPPT dan LIPI, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan FISIP UI, jaringan internet seperti [www.bmbf.de](http://www.bmbf.de), [www.auswaertigesamt.de](http://www.auswaertigesamt.de), [www.jakarta.diplo.de](http://www.jakarta.diplo.de) dan sebagainya.

## 1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut akan diuraikan sistematika penulisan tesis dengan tujuan agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Tesis ini akan terdiri atas lima bab, yakni:

**Bab 1** : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hubungan antar variabel, model analisis, hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab 2** : Pembahasan tentang peningkatan bantuan Jerman dalam kerjasama S&T kepada Indonesia pada 2000 – 2009.

**Bab 3** : Pembahasan dan analisis mengenai kepentingan Jerman di negara-negara berkembang yang antara lain meliputi kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan kemanusiaan dan kepentingan keamanan.

**Bab 4** : Pembahasan dan analisis mengenai kebijakan luar negeri Jerman tentang kerjasama dengan Indonesia antara lain dalam bidang ekonomi, S&T, politik dan kemanusiaan. Selain itu juga akan dibahas tentang kebijakan luar negeri Jerman terkait dengan prioritas perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kelautan. Hubungan variabel independen sehingga melahirkan variabel dependen juga akan diungkapkan dalam bab ini.

**Bab 5** : Kesimpulan dari keseluruhan analisis.